

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah melakukan penelitian dengan pengumpulan data triangulasi melalui kegiatan wawancara mendalam dengan tim UP JSC, observasi partisipatif kepada pengguna fitur JakLapor, serta studi dokumen resmi milik UP JSC. Kemudian peneliti menganalisis hasil penelitiannya dengan menggunakan analisis interaktif, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa meskipun dihadapi oleh beberapa tantangan, tetapi UP JSC telah berhasil mengimplementasikan *Open Government* melalui aplikasi JAKI, terutama pada fitur JakLapor yang dilihat dari prinsip transparansi, partisipasi, dan kolaborasi, yaitu:

1. Prinsip transparansi yang sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tercermin dari cara UP JSC menyediakan akses yang jelas dan terbuka terhadap informasi publik, seperti Pergub Provinsi DKI Jakarta 68/2022 dan SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022, data bulanan aplikasi JAKI, LKPD Provinsi DKI Jakarta, serta Laporan Tahunan JSC. Hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memahami data tersebut, yang kemudian berujung pada perwujudan indikator *Smart Governance* dan *Smart People* pada *Smart City*;
2. Prinsip partisipasi tercermin pada fitur JakLapor yang memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membuat laporan permasalahan sosial lokal, melakukan diskusi dengan sesama pengguna aplikasi JAKI, hingga memberikan ulasan berupa kritik dan masukan yang kemudian berujung pada perwujudan indikator *Smart People* pada *Smart City*; serta
3. Prinsip kolaborasi tercermin pada komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh antarpetugas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, serta kolaborasi dalam pengembangan dan pembaruan fitur aplikasi JAKI.

B. Saran

Secara keseluruhan, UP JSC telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip *Open Government* dan menjadikan aplikasi JAKI sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dalam pelayanan publik di DKI Jakarta. Hal ini terbukti dari berbagai penghargaan yang telah diterima oleh aplikasi JAKI dan fitur JakLapor. Walaupun begitu, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki oleh UP JSC dan petugas yang menindaklanjuti laporan masyarakat. Berikut ini beberapa saran dari peneliti kepada UP JSC dan petugas untuk memperbaiki kekurangan yang ada, yaitu:

1. Sosialisasi SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022

- a. Tim UP JSC perlu mengencangkan kembali sosialisasi tentang SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022. Ini penting agar semua pihak yang terlibat memahami dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Sehingga meminimalisir terjadinya salah koordinasi tindak lanjut laporan masyarakat; serta
- b. Sosialisasi ini juga harus mencakup masyarakat luas. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan panduan kategori yang membantu masyarakat menyesuaikan deskripsi masalah mereka sesuai dengan SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022 (lihat pada Gambar 4.22). Dengan adanya panduan tersebut, masyarakat diharapkan membaca SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022 terlebih dahulu sebelum memilih kategori laporan.

2. Tindak Lanjut Laporan oleh Petugas

- a. Petugas yang menindaklanjuti laporan masyarakat harus melakukannya dengan serius sampai permasalahan tersebut benar-benar terselesaikan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan efektivitas layanan. Sebab, tindak lanjut laporan yang cepat bukan berarti permasalahan diselesaikan dengan tepat. Petugas perlu memahami akar permasalahannya dan mempertimbangkan ekspektasi penyelesaian dari pelapor.

3. Verifikasi dan Validasi oleh Biro Pemerintahan

- a. Biro Pemerintahan harus lebih ketat dalam memvalidasi dan memverifikasi hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas. Mereka tidak boleh terlalu mudah menerima hasil tanpa memastikan bahwa masalah telah ditangani dengan baik di lapangan. Jika diperlukan, Biro Pemerintahan dapat menambahkan kriteria ketuntasan laporan menjadi lebih detail lagi. Misalnya laporan mengenai parkir liar, pada SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022 disebutkan kriteria ketuntasan laporannya meliputi foto dengan *timestamp*. Biro Pemerintahan bisa menambahkan detail, seperti foto yang menampilkan area yang sudah bersih dari kendaraan yang terparkir, serta penindakan terhadap juru parkir ilegal. Jadi tindak lanjut laporan dapat dikatakan selesai verifikasi dan validasi, apabila area tersebut sudah bersih dan juru parkir ilegal tersebut sudah ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chapman, D., & Cowdell, T. (1998). *New Public Sector Marketing*. Financial Times.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Quadrant.
- Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. In L. Ruma & J. Steele (Eds.), *O'Reilly Media, Inc.* (1st ed.). O'Reilly Media, Inc. <https://ia803000.us.archive.org/13/items/OpenGovernment/open-government.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook FOURTH EDITION* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mukarom, Z. (2020). *TEORI-TEORI KOMUNIKASI* (A. I. Setiawan (ed.)). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://md.uinsgd.ac.id>
- Morissan. (2015). *Metode Penelitian Survei* (A. C. Wardhani & F. H. U (eds.); 3rd ed.). Kencana.
- Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik* (10th ed.). Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK* (Sutoyo (ed.); 1st ed.). UNISRI Press. https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf
- Quinn, R. E., St. Clair, L. S., Faerman, S. R., Thompson, M. P., & McGrath, M. R. (2021). *Becoming a Master Manager A Competing Values Approach* (7th ed.). Wiley.
- Rahayu, A. Y. S., Juwono, V., & Rahmayanti, P. K. (2020). *Pelayanan Publik Dan E-Government: Sebuah Teori Dan Konsep* (Y. S. Hayati & Nuraini (eds.); 1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik* (1st ed.). Andi Publisher.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (5th ed.). Pustaka Pelajar. <http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=49310>
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yg bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruksi (MPK)* (3rd ed.). Alfabeta.

Syaukani, Afan, G., & Rasyid, M. R. (2016). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.

ARTIKEL JURNAL/PROSIDING KONFERENSI/SKRIPSI

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009). Smart city components architecture. *2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation*, 93–97. <https://doi.org/10.1109/CSSIM.2009.34>

Andewi Gati, R. (2022). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI DPM PTSP KOTA BANDUNG. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 4(1), 37–46. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/445>

Bahtiar, A. (2012). *PELESTARIAN KOLEKSI DIGITAL: STUDI KASUS DI THE JAKARTA POST INFORMATION CENTER* [Universitas Indonesia]. [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308566-S42735-Pelestarian koleksi.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308566-S42735-Pelestarian%20koleksi.pdf)

Fauzi, rief R., Istania, R., & Giyanto, B. (2023). Adaptasi Sistem Kerja Baru Pada Masa Pandemi Dalam Pelayanan Publik. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(2), 89–99. <https://doi.org/10.31289/publika.v11i2.10277>

Florida, R., & Naylor, T. D. (2003). The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. *Canadian Public Policy / Analyse de Politiques*, 29(3), 378–379. <https://doi.org/10.2307/3552294>

Gharaibeh, A., Salahuddin, M. A., Hussini, S. J., Khreishah, A., Khalil, I., Guizani, M., & Al-Fuqaha, A. (2017). Smart Cities: A Survey on Data Management, Security, and Enabling Technologies. *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, 19(4), 2456–2501. <https://doi.org/10.1109/COMST.2017.2736886>

Harrison, T. M., Guerrero, S., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N., Hrdinová, J., & Pardo, T. (2011). Open Government and E-Government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective. In J. C. Bertot, K. Nahon, S. A. Chun, L. F. Luna, Reyes, & V. Atluri (Eds.), *Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research* (Vol. 17, Issue 2, pp. 245–253). Digital Government Research Center. <https://doi.org/10.1145/2037556.2037597>

Jaeger, P. T. (2003). The endless wire: E-government as global phenomenon.

Government Information Quarterly, 20(4), 323–331. [https://doi.org/ 10.1016/J.GIQ.2003.08.003](https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2003.08.003)

- Luthfia, A. R., Alkhajar, E. N., & Sofyan, A. (2021). Tantangan Implementasi Pemerintahan Terbuka (Open Government) di Indonesia. *Wahana : Tridharma Perguruan Tinggi*, 73(2). [https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn/article/view/ 4269/3396](https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn/article/view/4269/3396)
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In J. C. Bertot, K. Nahon, S. A. Chun, L. F. Luna, Reyes, & V. Atluri (Eds.), *Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research, DG.O 2011, College Park, MD, USA, June 12 - 15, 2011* (pp. 282–291). Digital Government Research Center. <https://doi.org/10.1145/2037556.2037602>
- Singh, A., & Singla, A. R. (2020). Constructing definition of smart cities from systems thinking view. *Kybernetes*, 50(6), 1919–1950. <https://doi.org/10.1108/K-05-2020-0276/FULL/XML>
- Sofiana, A. (2023). Analisis Implementasi Open Government Melalui Aplikasi Jakarta Kini (Jaki) Pada Fitur Jak-Respon Dalam Penyebarluasan Informasi Publik | Journal of Social Contemplativa. *Journal of Soci*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.61183/jsc.v1i1.10>
- Suminar, L. R., & Nugroho, A. A. (2023). ADOPSI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DI SEKTOR PUBLIK: PELUANG PEMBENTUKAN SISTEM IDENTITAS DIGITAL NASIONAL DI ERA VUCA. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4), 81–92. <https://doi.org/10.33005/JDG.V12I4.3396>
- Ullah, Z., Al-Turjman, F., Mostarda, L., & Gagliardi, R. (2020). Applications of Artificial Intelligence and Machine learning in smart cities. *Computer Communications*, 154, 313–323. <https://doi.org/10.1016/J.COMCOM.2020.02.069>
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* (2nd ed.). Kencana.
- Wahyudi, Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2021). Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung). *Administrativa Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 253–266. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.98>
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open Government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5),

381–396. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. No. 14 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pub. L. No. 95 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Pub. L. No. 3 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003>

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 - 2017, Pub. L. No. 2 (2013). [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/RPJMD dan RKPD Provinsi/DKI Jakarta/RPJMD DKI Jakarta 2013-2017.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/RPJMD%20dan%20RKPD%20Provinsi/DKI%20Jakarta/RPJMD%20DKI%20Jakarta%202013-2017.pdf)

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City, Pub. L. No. 280 (2014). <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/10931/peraturan-gubernur-nomor-280-tahun-2014-tentang-pembentukan-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pengelola-jakarta-smart-city>

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management, Pub. L. No. 128 (2017). <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/6207/peraturan-gubernur-nomor-128-tahun-2017-tentang-penyelenggaraan-penanganan-pengaduan-masyarakat-melalui-aplikasi-citizen-relation-management>

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management, Pub. L. No. 39 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/127272/pergub-prov-dki-jakarta-no-39-tahun-2019>

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik, Pub. L. No. 114 (2019). <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/3854>

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Jakarta Smart City, Pub. L. No. 44 (2021). <https://jdih.jakarta.go.id/index.php/dokumen/detail/1767/peraturan-gubernur-nomor-44-tahun-2021-tentang-pendelegasian-pemberian-kuasa-jakarta-smart-city>

Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Pengelola Jakarta Smart City Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pub. L. No. 17 (2020). <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/2172>

Surat Keputusan Sekretaris Daerah (SK Sekda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas SK Sekda Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi CRM., Pub. L. No. 99 (2022). <https://drive.google.com/file/d/101-Ss9qkH2z1m4s0pge5fvRMI-V1AEQQ/view>

LAPORAN

ASPAN, UNDPEPA, & UNDESA. (2001). Benchmarking E-government: A Global Perspective Assessing the Progress of the UN Member States. In *United Nations Division for Public Economics and Public Administration and American Society for Public Administration*. <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/English.pdf>

Dinas Komunikasi, I. dan S. P. D. J. (2018). Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. In *Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta*. <https://www.diskom.info/jakarta/uploads/images/Rencana-Strategis-Diskominfortik.pdf>

WEB PAGE/NEWSPAPER ARTICLE

Ahdiat, A. (2023). *Riwayat Banjir Jakarta 5 Tahun Terakhir, Membaik atau Memburuk?* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/riwayat-banjir-jakarta-5-tahun-terakhir-membaik-atau-memburuk>

Andika, M. L. (2021, June 29). Duh! Jalan Rusak Jadi Penyebab Banyak Kecelakaan Lalu Lintas di Jakarta. *DetikOto*. <https://oto.detik.com/berita/d-5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelakan-lalu-lintas-di-jakarta>

Annur, C. M., & Ahdiat, A. (2023). *10 Kota dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, Tokyo Teratas*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/28/10-kota-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-tokyo-teratas>

Annur, C. M., & Santika, E. F. (2023). *Terus Meningkat, Sampah DKI Jakarta Tembus 11 Juta Ton dalam Empat Tahun*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id>

/datapublish/2023/10/18/terus-meningkat-sampah-dki-jakarta-tembus-11-juta-ton-dalam-empat-tahun

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *implementasi*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

Bahtiar, A. (2012). *PELESTARIAN KOLEKSI DIGITAL: STUDI KASUS DI THE JAKARTA POST INFORMATION CENTER* [Universitas Indonesia]. [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308566-S42735-Pelestarian koleksi.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308566-S42735-Pelestarian%20koleksi.pdf)

Balai Bahasa Kalimantan Selatan. (2018). *Pelayanan Publik - Balai Bahasa Kalimantan Selatan*. Balai Bahasa Kalsel. <https://balaibahasakalsel.kemdikbud.go.id/2018/11/19/pelayanan-publik/>

Cabinet Office of Japan. (2024). *Society 5.0*. Cabinet Office, Government of Japan. https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/

Didik, E. (2018). *Qlue Performa Indonesia*. BINUS UNIVERSITY School of Information Systems. <https://sis.binus.ac.id/2018/12/20/qlue-performa-indonesia/>

Diplomat Magazine. (2014). *Azerbaijan's E-Government-Based One-Stop-Shop*. Diplomat Magazine. <https://diplomatmagazine.com/azerbaijans-e-government-based-one-stop-shop/>

Faruq, N. S. Al, & Tolok, A. D. (2023, March 14). Dinas Bina Marga Jakarta Siapkan Rp300 Miliar untuk Perbaikan Jalan. *Bisnis.Com*. <https://jakarta.bisnis.com/read/20230314/77/1637270/dinas-bina-marga-jakarta-siapkan-rp300-miliar-untuk-perbaikan-jalan>

Global Integrity. (2019). *Open Government*. Global Integrity. <https://www.globalintegrity.org/what-we-do/opengov/>

GlobalData. (2020). *History of smart cities: Timeline*. Verdict. <https://www.verdict.co.uk/smart-cities-timeline/>

Gagat Hanggara, A. (2020, April 14). *Mengenal Layanan Pemerintah Jakarta yang Sudah Online*. Jakarta Tanggap COVID-19. <https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/mengenal-layanan-pemerintah-jakarta-yang-sudah-online>

Has, D. F. S. (2023). *KUALITAS UDARA JAKARTA BURUK, PERNAFASAN SEMAKIN TERPURUK*. Universitas Muhammadiyah Gresik. <https://umg.ac.id/opini/kualitas-udara-jakarta-buruk-pernafasan-semakin-terpuruk>

- Hawa, B. L. (2023). Catatan Jakarta ke-496: Permasalahan Kota dan Upaya Pemprov DKI Jakarta. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/cytijenjkt/64a3d1684addee386d6ff972/catatan-jakarta-ke-496-permasalahan-kota-dan-upaya-pemprov-dki-jakarta>
- Hendrawan, A. (2019). Open Government: Perkembangan dan Masa Depan. *Sindonews*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1388938/18/open-government-perkembangan-dan-masa-depan>
- Humas Menpanrb. (2014). *Indonesia Resmi Gabung Open Government Partnership*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-resmi-gabung-open-government-partnership>
- Jakarta Smart City. (2023a). *Jakarta*. Jakarta. <https://jakarta.go.id/aplikasi-jaki>
- Jakarta Smart City. (2023b). *Jakarta Smart City*. Jakarta Smart City. <https://smartcity.jakarta.go.id/id/sejarah/>
- Jakarta Smart City. (2023c). *Jakarta Smart City*. Jakarta Smart City. <https://www.jakarta.go.id/jakarta-smart-city>
- Jakarta Smart City. (2023d). *Laporan Tahunan Jakarta Smart City 2023*. <https://smartcity.jakarta.go.id/docs/Laporan-Tahunan-Jakarta-Smart-City-2023.pdf>
- Jakarta Smart City. (2024). *Dasbor Data Bulanan Cepat Respon Masyarakat*. CRM. <https://crm.jakarta.go.id/data-bulanan>
- Khoirunnisaa, J. (2023, October 20). Langkah Konkret Pemprov DKI Tangkal Banjir di Jakarta. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6992565/langkah-konkret-pemprov-dki-tangkal-banjir-di-jakarta>
- Mariatin, Jantri, S., & Amirullah. (2019). *e-Modul Masalah Sosial*. Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://repositori.kemdikbud.go.id/19472/1/Kelas_XI_Sosiologi_KD_3.2_%20281%29.pdf
- OECD. (2019). *Open government*. OECD. <https://www.oecd.org/gov/open-government/>
- Office of Management and Budget of United States. (2009). *MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES*. Executive Office of The President Office of Management and Budget. <http://www.usdoj.gov/ag/foia-memo-march2009.pdf>

- Open Government Indonesia*. (2023). *Open Government Indonesia*. Open Government Indonesia. <https://ogi.bappenas.go.id/>
- Open Government Parternship*. (2024a). *Canada Engage Civil Society on Open Government (CA0060)*. Open Government Parternship. <https://www.open.govpartnership.org/members/canada/commitments/CA0060/>
- Open Government Parternship*. (2024b). *OGP Process*. Open Government Parternship . <https://www.opengovpartnership.org/process/>
- Open Government Parternship*. (2024c). *SEMARANG, INDONESIA Increasing the number and the handling of community aspirations and complaints on the Lapor Hendi platform, especially for women and people with disabilities*. Open Government Parternship. <https://www.opengovpartnership.org/members/semarang-indonesia/commitments/IDSMG0005/>
- Rizkinaswara, L. (2020). *Revolusi Industri 4.0*. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>
- Sofa, A. (2023). *Beda Akses Layanan Publik Sebelum dan Setelah Ada JAKI*. Jakarta Smart City. [https://smartcity.jakarta.go.id/uploads/2141aee1-f8e9-425d-94d4-6b3c7b304723/Buku Elektronik Jurnal Artikel Comms 2023.pdf](https://smartcity.jakarta.go.id/uploads/2141aee1-f8e9-425d-94d4-6b3c7b304723/Buku_Elektronik_Jurnal_Artikel_Comms_2023.pdf)
- Sofa, A., & Batubara, R. M. (2023). *Jarang Dilaporkan, Ini Lima Kategori Permasalahan di JAKI*. Jakarta Smart City. [https://smartcity.jakarta.go.id /id/ blog/jarang-dilaporkan-ini-lima-kategori-permasalahan-di-jaki/](https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/jarang-dilaporkan-ini-lima-kategori-permasalahan-di-jaki/)
- Sofa, A., Batubara, R. M., & Hanggara, A. G. (2023a). *Kenali Smart City, Definisi dan Pengertiannya*. Jakarta Smart City. <https://smartcity.jakarta.go.id/id/ blog/ men genal-konsep-pengertian-smart-city/>
- Sofa, A., Batubara, R. M., & Hanggara, A. G. (2023b). *Serunya JSC Goes to School Bersama Grab*. Jakarta Smart City. <https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/serunya-jsc-goes-to-school-bersama-grab/>
- Tempo. (2019, November 2). *JAKI, Aplikasi untuk Evaluasi Kinerja Pemprov DKI*. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1267578/jaki-aplikasi-untuk-evaluasi-kinerja-pemprov-dki>
- U.S. Department of Agriculture. (2024). *E-Government (E-Gov)*. U.S. Department of Agriculture. <https://www.usda.gov/ocio/centers/irmc/e-government>
- UNECE. (2024). *Smart Sustainable Cities*. UNECE. <https://unece.org/housing/smart-sustainable-cities>